

BPK Anggap Modal Pemkot di PDAM Temuan

PONTIANAK, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan menganggap penyertaan modal dari Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp 29 miliar tahun anggaran 2010 pada Perusahaan Air Minum Daerah PT Tirta Khatulistiwa untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih sebagai temuan.

"Alasan BPK Perwakilan Kalimantan Barat penyertaan modal tersebut harus didukung dalam bentuk peraturan daerah sehingga ada pertanggungjawabannya," kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji, Selasa (7/6).

Ia menjelaskan temuan tersebut sifatnya hanya kesalahan administrasi sehingga bisa diperbaiki. "Kami sebenarnya waktu itu akan membuat Perda untuk penyertaan modal sebesar Rp 29 miliar ke PDAM

tetapi menurut aturan tidak perlu. Kalau BPK telah mengharuskan didukung Perda maka akan kami buat," katanya.

Sutarmidji menjelaskan sebenarnya ada lima komponen yang menjadi temuan BPK salah satunya penyertaan modal tersebut, sementara sisanya juga hanya kesalahan administrasi. Menurut persepsi Pemkot Pontianak, penyertaan modal itu sudah masuk dalam APBD sehingga tidak perlu Perda tersendiri. "Ternyata benar tidak perlu didukung Perda, karena aturan yang mengharuskan penyertaan modal didukung oleh Perda telah dicabut oleh Mendagri," katanya.

Selain itu, temuan berikutnya oleh BPK terkait distribusi buku dibidang pendidikan yang



TRIBUN/PAB
PARIPURNA - Suasana sidang paripurna laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota 2010 oleh Walikota Pontianak, Sutarmidji, Selasa (7/6).

■ Bersambung ke Hal 15

BPK Anggap Modal Pemkot di

Sambungan Hal. 9

terlambat sehingga Pemkot telah mendenda tiga perusahaan sebesar Rp 200 juta lebih.

Untuk melayani sekitar 30 ribu pelanggan baru membutuhkan investasi sekitar Rp 112 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan instalasi atau tempat penampungan air PDAM sebelum didistribusikan.

Investasi sebesar itu untuk

pembangunan instalasi air PDAM di kawasan Siantan Hulu dan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, dan penambahan kapasitas tampung instalasi air di Sungai Penapat serta di Kecamatan Pontianak Barat.

Instalasi itu diperkirakan mampu mendistribusikan air sekitar 2.000 meter kubik per detik sehingga bisa menjangkau

wilayah-wilayah yang selama ini distribusi airnya belum normal.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Arif Joni Prasetyo mengharapkan audit BPK tahun depan bisa mencapai WTP. "Realisasi pendapatan APBD dan belanja sudah memenuhi target sekitar 90 persen. Itu sudah suatu pencapaian yang bagus," tukasnya. (pab/ant)